

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan: Meskipun pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mengambil pendekatan proaktif dengan membentuk BPBD sebagai infrastruktur utama untuk penanggulangan bencana, efektivitas implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Hambatan dalam koordinasi dan komunikasi antar instansi, serta keterbatasan sumber daya, telah mengurangi kesiapsiagaan dan responsibilitas BPBD.
2. Peran BPBD: BPBD memiliki peran penting dan multifaset dalam menangani bencana longsor, namun dalam praktiknya, terdapat kendala signifikan. Koordinasi dengan instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat setempat sering kali kurang efektif. Selain itu, keterlibatan TNI, POLRI, dan komunitas lokal tidak selalu berjalan mulus. Pelatihan dan kampanye edukasi yang dilaksanakan BPBD juga belum mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara optimal.
3. Pengambilan Keputusan: Proses pengambilan keputusan BPBD dalam alokasi anggaran dan sumber daya menghadapi tantangan besar. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran dan kurangnya kerjasama dari sebagian masyarakat. Meskipun BPBD telah berupaya melakukan pemetaan daerah rawan longsor dan membentuk tim tanggap darurat, upaya ini sering kali terhambat oleh faktor-faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan dari pihak terkait.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Meskipun terdapat upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan

sumber daya, potensi konflik kepentingan politik tetap menjadi ancaman. Sistem pelaporan terbuka dan audit independen yang diterapkan belum sepenuhnya mampu meminimalkan risiko tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat yang rendah memperburuk situasi, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1. Saran Praktis**

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Deli Serdang, diperlukan beberapa langkah praktis. Pertama, perlu ada peningkatan dalam pelatihan dan kapasitas petugas penanggulangan bencana melalui program pelatihan rutin dan simulasi bencana yang lebih sering, sehingga mereka lebih siap menghadapi situasi darurat. Kedua, kampanye edukasi kepada masyarakat harus diperluas dan lebih intensif, termasuk penggunaan media sosial dan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak orang. Ketiga, diperlukan perbaikan infrastruktur penanggulangan bencana, seperti penambahan alat berat dan fasilitas evakuasi, terutama di daerah-daerah rawan longsor. Keempat, penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dalam penanganan bencana agar respons lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik.

### **5.2.2. Saran Teoritis**

Dari segi teoritis, penelitian ini menyarankan pengembangan model kebijakan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang menggabungkan pendekatan struktural dan non-struktural. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat lokal, termasuk analisis perilaku masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Selain itu,

perlu adanya kajian mengenai efektivitas berbagai strategi edukasi dan kampanye kesadaran bencana dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kajian-kajian ini akan memberikan dasar teoritis yang kuat bagi pengembangan kebijakan dan program penanggulangan bencana yang lebih efektif di masa mendatang. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya koordinasi antara BPBD, instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Penelitian lebih lanjut bisa mengeksplorasi model kerjasama yang efektif, hambatan yang dihadapi, serta strategi untuk meningkatkan sinergi antar pihak dalam penanggulangan bencana.